

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Basah, Sjachran. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung : Alumni.
- Basah, Sjachran. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta Rajawali Pers.
- Bhakti, Teguh Satya, dkk. 2014. *Bungai Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta : Genta press.
- Bruggink, J. J. H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers
- Harahap, Zairin. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hartini, Sri dan Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HR., Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Huisman, R.J.H.M. 1983. *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*. Amstedam : Kobra.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Indroharto.1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, SF. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Marbun, SF dan MD, Moh. Mahfud. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Marwadi, Irvan. 2016. *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta : Thafa Media.

- Marzuki, Peter Mahmud S.H.,MS.,LL.M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta Liberty.
- Oostenbrink, J.J. 1967. *Administrative Sancties*. s'Gravenhage, tt : Vuga – Boekerij.
- Prins, WF. 1975. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta : Andalusia.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Situmorang, Victor dan Soedibyo.1992. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Utrecht, E. 1957. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Balai Buku Indonesia.
- Utrecht, E. 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Van der Pot, C.W. 1932. *Nederlandsch Bestuursrecht*. Alphen aan den Rijn.
- Versteden, C.J.N. 1984. *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Alphen aan den Rijn : Samsom H.D. Tjeenk Willink.
- Wade, H.W.R. 1971. *Administrative Law*, Third Edition. Oxford : Clanderon Press.
- Wijk, van H.D dan Konijnenbelt, Willem. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. s'Gravenhage : Vuga.
- Wiyono, R. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.